



Sultan Kritik "Uang Terima Kasih"

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan HB X angkat bicara soal adanya "uang terima kasih" dalam proyek infrastruktur di Kota Jogja.

Menurut Sultan, seorang pejabat seharusnya tidak melakukan sesuatu di luar proporsinya sebagai abdi negara. "mestinya hal-hal di luar proporsi itu mestinya tidak dilakukan," ucapnya saat ditemui di kompleks Kepatihan, Jogja, sesuai menerima kunjungan perwakilan Parlemen Hungaria, Kamis (13/2).

Ditanya soal etika atau tanggung jawab moral pejabat yang seharusnya tidak melakukan tindakan tersebut, HB X pun menjawab dengan diplomatis.

"Tergantung cara menafsirkannya, ya kan, kalau saya mengatakan tidak setuju, yang lain mengatakan setuju kan bisa [terjadi]. Susah, itu relatif," katanya.

Seperti diketahui, permintaan "uang terima kasih" kepada perusahaan pemenang proyek itu dinyatakan oleh Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Aki Lukman dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap proyek Saluran Air Hujan (SAH) Supomo, Rabu (12/2). Dalam keterangannya, Aki mengakui saat penandatanganan kontrak pengerjaan SAH Supomo oleh PT Widoro Kandang, mantan Kepala DPUPKP Kota Jogja, Agus Tri Haryono sempat meminta jalah sebesar 0,5% dari nilai kontrak.

Uang itu, kata Aki, diberikan pemenang proyek setelah pekerjaan selesai sebagai tanda terima kasih. Meski demikian, tidak semua rekanan memberi, dan baru kali ini pula Wali Kota Jogja mendapat jatah. "Katanya, ada target yang harus dicapai dari uang terima kasih ini. Tahun lalu targetnya sebesar Rp220 juta," ucap dia.

Selain itu, JPU juga sempat menunjukkan catatan Aki terkait dengan target tersebut. Dalam catatan itu tertulis fee untuk H (Haryadi Suyuti) sebesar Rp150 juta; untuk A (Agus Tri Haryono) sebesar Rp20 juta; untuk D (anggota DPRD Kota Jogja Komisi C) sebesar Rp20 juta; dan untuk T (jaksa Kejaksaan Tinggi) sebesar Rp10 juta.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Agus Tri Haryono yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja belum bisa ditemui. Saat beberapa kali *Harian Jogja* mendatangi kantornya, staf yang bertugas pun mengatakan yang bersangkutan sedang tak ada di tempat.

(Sunartono)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Negatif	Segera	Untuk Ditanggapi
2. Inspektorat			
3. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 29 Februari 2020
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005